

JURNAL

Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ADI NUGROHO SETIARSO

NIM. 0910113064



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

JURNAL

Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan

(Studi Normatif Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

Oleh:

ADI NUGROHO SETIARSO

NIM.0910113064

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. A. Rachmad Budiono SH. MH

NIP. 19591118 198601 1 002

Imam Ismanu SH. MS

NIP. 19510727 198002 1 001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Siti Hamidah, SH.MM.

NIP. 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN
JURNAL

Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan
(Studi Normatif Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

Oleh:
ADI NUGROHO SETIARSO
NIM.0910113064

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 5 maret 2013

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Dr. A. Rachmad Budiono,SH.MH
NIP. 19591118 198601 1 002

Anggota

Dr. Rachmad Syafa'at SH, M.Si
NIP. 19620805 198802 1 001

Anggota

Umu Hilmy ,SH.MS
NIP. 19490712 198403 2 001

Ratih Dheviana Puru H.T, SH.
NIP. 19790728 200502 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum

Siti Hamidah, SH.MM.
NIP. 19591216 198503 1 001

Dr. Sihabudin, SH, MM.
NIP. 19660622 199002 2 001

ABSTRAKSI

Penulis membahas tentang akibat hukum ketidakjelasan pengaturan mengenai insolvensi khususnya bagi debitur yang berbentuk Perseroan Terbatas dimana keadaan suatu perusahaan yang masih solven tetapi dapat dipailitkan oleh pengadilan niaga. Dikarenakan pengaturan untuk memailitkan suatu debitur sangat sederhana hanya dengan minimal dua kreditor dan salah satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dari permasalahan ini penulis mencoba menganalisis Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

Adapun tujuan penulis mengangkat topik permasalahan ini Untuk mengetahui akibat hukum dengan ketidak jelasan pengaturan mengenai insolvensi khususnya bagi debitur yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian hukum normatif, karena penulis akan melakukan penelitian dengan menganalisis perundang – undangan dan peraturan – peraturan yang berlaku mengenai hukum kepailitan di Indonesia. Kemudian, dianalisis sesuai dengan undang– undang dan peraturan yang ada dan kemudian ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti apakah perusahaan yang masih solven dapat di pailitkan. Sedangkan Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konsep.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini ialah bahwa Dalam hal pelaksanaannya, Undang-undang kepailitan seharusnya menentukan pembatasan jumlah minimal utang yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit baik kepailitan terhadap orang perorangan maupun terhadap perseroan terbatas, serta ketentuan yang menyatakan bahwa subjek hukum khususnya perseroan terbatas dapat dipailitkan apabila jumlah total seluruh utang melebihi asset perseroan terbatas yang berarti bahwa pasiva perseroan melebihi aktiva perseroan terbatas dan berkaitan dengan prinsip *commercial exit from financial distress*, maka perlunya Undang-undang kepailitan menerapkan ketentuan insolvency test sebelum permohonan pailit diperiksa oleh hakim. Hal ini untuk melakukan perlindungan hukum terhadap perusahaan yang sangat solven dan tidak ada masalah dengan kinerja keuangannya dapat dinyatakan pailit karena syarat yang terlalu sederhana yaitu minimal ada dua kreditur dan utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan kata lain, kepailitan bisa digunakan untuk membangkrutkan perseroan dan bukan sebaliknya sebagai alternatif solusi penyelesaian kebangkrutan perseroan. Inilah kesalahan terbesar dari filosofi kepailitan yang ditanamkan dalam Undang-undang kepailitan di Indonesia.

Perlunya Undang-undang kepailitan mengatur mengenai bubarnya perseroan terbatas adalah antara lain karena tidak cukupnya harta perseroan untuk melunasi utang-utang perseroan terbatas yang pailit serta karena perseroan terbatas memasuki fase insolvensi dalam proses kepailitan

ABSTRACT

Writer discuss about the consequences law obscurity arrangement on salary insolvensi especially for debtor shaped limited company where the state of a company still solven but can dipailitkan by commercial court. Because the setting for memailitkan a debtor very simple only with at least two creditors and one of debt has due and can long-billed, of this problem writer trying to analyze the state of insolvensi in bankruptcy (study normative article 2 paragraph 1 act no 37 2004 on bankruptcy and suspension of debt payment)

The purpose of the author of the topic issue to determine due to the lack of clarity in the law regarding insolvency arrangements particularly for borrowers in the form of Limited Liability Company.

Type of research by the author is normative legal research, because I would do the research by analyzing the legislation - legislation and regulations - regulations concerning bankruptcy law in Indonesia. Then, analyzed in accordance with laws and regulations and then draw conclusions relating to the problems examined whether the company is still solvent can pailitkan. While the approach used is the Regulatory Approach and Approach Concept.

The results of the research that has been conducted by the authors is that in terms of implementation, bankruptcy law should specify restrictions on the minimum amount of debt that can be used as a basis to file a bankruptcy petition against the bankruptcy of both individuals and the limited liability company, as well as the provision stating that legal subjects particularly if the corporation can bankrupt entire debt exceeds total assets of the limited liability company which means that liabilities exceed assets limited liability company and is related to commercial principles exit from financial distress, the need for legislation to implement the provisions of the bankruptcy petition bankruptcy insolvency test before examined by the judge. This is to make the protection of the law against companies that are very solvent and no problems with its financial performance can be declared bankrupt because it is too simple requirement that at least two creditors and the debt is due and payable. In other words, bankruptcy can be used for bankrupting the company and not vice versa as the alternative solution to bankruptcy settlement company. This is the biggest mistake of philosophy instilled in bankruptcy bankruptcy law in Indonesia.

The need for bankruptcy laws governing the dissolution of the limited liability company is among others due to insufficient assets to pay off the company's debts and insolvent limited liability company as a limited liability company into insolvency phase in the process of bankruptcy

KATA KUNCI

1. Debitur Adalah Debitur adalah pihak yang berhutang kepada pihak lain yang dijanjikan untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pihak lain yang menghutangi ini biasa disebut sebagai kreditur. Dalam konteks perbankan biasanya dalam melakukan hutang atau peminjaman seorang debitur memerlukan agunan atau jaminan.
2. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor
3. Insolvensi adalah insolvensi disebut sebagai keadaan tidak mampu membayar. Jadi insolvensi itu terjadi (demi hukum) jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar.
4. Perseroan Terbatas adalah perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal.

PENDAHULUAN

Penyelesaian masalah utang piutang merupakan agenda utama nasional dalam rangka pemenuhan ekonomi secara cepat dan efisien untuk itu pula pengaturan tentang kepailitan sangat penting dilaksanakan agar penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi masalah yang penting untuk segera diselesaikan.¹ Berkaitan dengan hal tersebut setiap perusahaan mungkin atau pasti mempunyai utang. Bagi suatu perusahaan, utang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asal perusahaan tersebut masih dapat membayar kembali. Perusahaan yang begini biasa disebut perusahaan yang *solven*, artinya perusahaan yang mampu membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya jika suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya lagi disebut *insolven*, artinya tidak mampu membayar.²

Lahirnya peraturan mengenai kepailitan diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam perekonomian nasional dan memberikan rasa keadilan, baik terhadap kreditor maupun debitor. Menurut W.Friedman, Suatu Undang-undang atau peraturan haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun terdapat perbedaan-perbedaan di antara pribadi-pribadi itu, kalau tidak ada kedudukan sosial, kemajuan dalam hidup dicapai bukan atas dasar reputasi melainkan karena kapasitas, kelas-kelas dalam masyarakat bukan faktor yang menentukan sosial saja.³

Salah satu paradigma hukum kepailitan adalah adanya nilai keadilan sehingga hukum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya yaitu memberikan manfaat, kegunaan dan kepastian hukum. Satjipto rahardjo menyatakan “hukum

¹ Robintan Sulaiman dan joko prabowo, *lebih jauh tentang kepailitan*, Karawaci : Delta Citra Grafindo, hlm 1

² Zaeni Asyhdie, *Hukum Bisnis”Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia”*, (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm 1.

³ W. Friedman, *teori dan filsafat hukum dalam buku telaah kritis atas teori-teori hukum* diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theori* oleh Arifin (Jakarta : raja grafindo persada, 1993), Hlm 7

sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.⁴

Inisiatif pemerintah untuk merevisi peraturan tentang kepailitan sebenarnya timbul karena ada tekanan dari Dana Moneter Internasional atau *Internasional Monetary Fund* (IMF) yang mendesak supaya Indonesia menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban oleh debitor kepada kreditor. IMF merasa bahwa peraturan kepailitan yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda selama ini kurang memadai dan tidak dapat memenuhi tuntutan zaman.⁵

Ditetapkannya Perpu nomor 1 tahun 1998 jo Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 selanjutnya disebut Undang-undang kepailitan dalam mengatasi gejolak moneter yang diharapkan menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan utang piutang antara kreditor dan debitor secara cepat, adil dan efektif tidak terlaksana, hal ini karena desakan untuk segera mungkin untuk memperbaiki peraturan kepailitan dengan cara tambal sulam pasal-pasal peraturan kepailitan yang ada, sehingga banyak ketentuan dalam pasal-pasal yang diubah tidak sempurna yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Hikmanto juwana berpendapat bahwa amandemen atas Undang-undang kepailitan sangat dominan melindungi kepentingan kreditor. Hal ini bisa dilihat dari syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana termaktub dalam pasal 2 angka 1 Undang-undang kepailitan yaitu adanya dua atau lebih utang dan salah satunya telah jatuh tempo. Namun dalam amandemen Undang-undang kepailitan tersebut tidak satu ketentuan yang mensyaratkan bahwa debitor harus dalam keadaan tidak mampu membayar (*Insolvency*). Tentunya hal ini bertentangan dengan filosofi universal dari Undang-undang Kepailitan yaitu memberikan jalan keluar bagi debitor dan kreditor bilamana debitor sudah dalam keadaan tidak lagi mampu membayar utangnya.

⁴ Satjipto Rahadjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Hukum*, (Surakarta :Universitas Muhamadiyah, 2002), Hlm 60

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *kepailitan seri hukum bisnis*, Jakarta : Raja Grafindo persada, 2002 hlm 1

Praktek penjatuhan pailit dalam Undang-undang Kepailitan banyak menimbulkan problematika dan debat yuridis. Salah satu penyebabnya adalah karena pengaturannya banyak yang tidak jelas dan adanya ketidak sinkronan antara peraturan perundang-undangan seperti yang terdapat dalam pasal 142 huruf d dan e yang menjelaskan bahwa pembubaran perseroan terbatas dikarenakan kondisi keuangan perusahaan tidak cukup untuk melunasi keuangannya dan karena perseroan terbatas memasuki fase insolvensi namun dalam pasal 2 ayat 1 tentang syarat dijatuhkan pailit tidak mengatur kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan insolvensi sehingga memberikan peluang untuk beragam penafsiran yang berakibat ketidakpastian hukum. Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.⁶ Pernyataan tersebut mengakibatkan debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak putusan pailit dijatuhkan.

Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi. Tahap ini penting artinya karena pada tahap inilah nasib debitor pailit ditentukan. Apakah harta debitor akan habis dibagi-bagi sampai menutup utangnya, ataupun debitor masih dapat bernafas lega dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi utang. Apabila debitor sudah dinyatakan insolvensi, maka debitor sudah benar-benar pailit, dan hartanya segera akan dibagi-bagi, meskipun hal ini tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa dilanjutkan.⁷ Untuk mempailitkan debitor Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak mensyaratkan agar debitor berada dalam keadaan *insolvensi*. Hal ini tentu melindungi kepentingan kreditor, tidak diterapkannya *insolvensi test* mengakibatkan perusahaan di Indonesia bangkrut secara hukum. Padahal dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini bila persyaratan insolvensi diterapkan maka

⁶ Rudy Lontoh (ED), *Penyelesaian utang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang*, Bandung : Alumni, 2001 hlm 23

⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam teori dan praktek*, Bandung: citra Aditya Bakti, 1999 hlm 135

akan sulit membuat debitor di Indonesia dinyatakan pailit. Logikanya dapat dilihat pada krisis moneter sebenarnya tidak membuat debitor Indonesia dalam keadaan *Insolvensi* karena kehilangan pangsa pasar (*Market Share*) atau pendapatan dalam bentuk rupiah. Krisis moneter menyebabkan debitor tidak lagi mampu membayar utang karena adanya perbedaan kurs yang mengakibatkan utang dalam mata uang asing tidak terbayarkan dengan pendapatan dalam mata uang rupiah⁸. Seharusnya Konsep *Insolvency test* dimasukkan dalam Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terutama dalam rangka pemberian perlindungan terhadap debitor, selain untuk mengetahui apakah ketidak mampuan membayar debitor disebabkan karena perusahaan bangkrut ataukah karena tidak mau membayar utangnya karena alasan tertentu.

Undang-undang Kepailitan pada Penjelasan Psal 2 ayat (1) juga menyatakan bahwa kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ialah ketiga golongan kreditor, yaitu krediotr separatis, kreditor preferens, dan kreditor konkuren. Dari kasus yang pernah terjadi, misalnya PT Dirgantara Indonesia dan Adam Air, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan tersebut diajukan oleh golongan kreditor preferens. Golongan kreditor preferens, menurut Pasal 1149 KUHPerdara juga meliputi para buruh/ karyawan perusahaan. Artinya bila gaji karyawan yang menjadi haknya itu tidak segera dibayarkan dan mereka tidak bersabar maka, perusahaan berpotensi besar dapat dinyatakan pailit. Untuk memnuhi syarat pailit begitu mudahnya karena tidak meliputi keadaan keuangan debitor. yang membatalkan putusan pernyataan pailit, biasanya berkuat pada syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 2 saja. Walaupun Hakim beranggapan bahwa debitor dalam keadaan keuangan yang sehat sehingga tidak layak untuk dipailitkan, namun itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit. Sekali lagi, dasar diterima atau ditolaknya permohonan pailit harus didasarkan pada syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Di Indonesia tidak dikenal adanya "*insolvency test*" terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pailit. Harusnya Undang-Undang Kepailitan juga memberikan pengaturan tentang kondisi keuangan debitor sebagai

⁸ Hikmanto Juwana, *Hukum Sebagai Instrumen Politik*, Medan, 2004, halaman 12

syarat untuk bisa dinyatakan pailit. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengandung asas kelangsungan usaha, dimana debitor yang masih prospektif dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya. Untuk melihat prospektif debitor salah satunya dapat dilihat dari keadaan keuangannya. Namun, Undang-undang Kepailitan sama sekali tidak menyinggung tentang kondisi keuangan debitor sebagai syarat dijatuhkannya putusan pailit. Lembaga kepailitan yaitu pengadilan niaga harusnya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan utang-utang yang sudah tidak mampu lagi dibayar oleh debitor.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

Apa akibat hukum ketidakjelasan pengaturan mengenai insolvensi khususnya bagi debitor yang berbentuk Perseroan Terbatas?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dibandingkan dengan pendapat-pendapat para ahli hukum atau doktrin dan menggunakan pola pikir deduktif yang melihat sebuah fenomena itu sebagai gejala yang makro. Sehingga output yang dihasilkan bersifat khusus yakni putusan hakim pengadilan niaga yang dihasilkan itu harus selaras dengan tujuan hukum (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan).

Penelitian hukum normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti adalah pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Fokus penelitian hukum doktrinal adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum doktrinal⁹ dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Jenis penelitian ini digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak yang digunakan adalah analisis terhadap Undang-undang kepailitan Indonesia saat ini dianggap tidak sesuai lagi dengan filosofi kepailitan, khususnya untuk persyaratan untuk menyatakan pailit tersebut, dimana dengan dihilangkan klausula “debitor yang tidak mampu membayar” tersebut maka tidak dapat dibedakan lagi mana debitor yang tidak membayar utangnya karena memang tidak mampu dan mana debitor yang tidak membayar utangnya karena memang tidak mau. Filosofi yang demikian secara umum tidak terdapat dalam Undang-undang kepailitan nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Prenada Media Group, jakarta, hlm 35

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini ada 2 (dua) pendekatan. Yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah kinsistensi dan kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya, antara undang-undang dengan UUD, antara regulasi dengan undang-undang.¹⁰

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

C. jenis dan bahan sumber hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat kedalam¹¹ dan diurut secara hirarki. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

¹⁰ M.Syamsudin, *operasional penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 58

¹¹ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004, hlm 31

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹². Adapun yang menjai bahan hukum primer dari penelitian ini adalah :

- a) Kitab undang-undang Hukum Perdata pasal 1149.
- b) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI)1945;
- c) Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 4 angka 1 dan pasal 55 ayat 1
- d) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang pasal 2 ayat 1 dan pasal 8.
- e) Undang-undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari penjelasan Undang-undang¹³. Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustakayang bersifat sebagai penunjang dari bahan-bahan hukum primer sebagai contoh buku-buku, jurnal, majalah, bulletin dan internet

3. Bahan hukum tersier

Yang Merupakan bahan-bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literature-literatur terkait dengan permasalahan yang dikaji. sumber bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian bahan hukum ini, adalah :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia ;

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006, hlm 141

¹³ Pengkajian yang dilakukan terhadap masalah peraturan perundang-undangan yang koheren. Dalam hal ini kusnu Goesniadhie dalam buku *Harmonisasi Hukum*, JP Books, Surabaya, 2006, Halaman 51 mengemukakan bahwa hukum sebagai norma positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan diterbitkan sebagai produk eksplisit suatu kekuasaan politik tertentu yang memiliki legitimasi.

b. Kamus hukum ;

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang berkaitan yang berkaitan dengan peratutan perundang-undangan bidang kehakiman terutama yang berkaitan dengan aspek pengaturan insolvensi dalam undang-undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan saat ini di indonesia.

Teknik yang dipakai oleh penulis adalah dengan cara mengutip, baik secara langsung maupun *paraphrase* atau sebuah kutipan yang sumbernya tidak ditulis sama persis tetapi yang dikutip hanyalah ide, gagasan atau semangat yang terdapat dalam sumber aslinya. Selain itu memakai teknik mengakses dan menyalin dari artikel internet yang berkaitan dengan penulisan ini.

E. Teknik Analis Bahan Hukum

Bahan- bahan hukum di kategorikan, disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan interpretasi dengan urutan:

1. menganalisis bahan hukum primer terlebih dahulu dengan menggunakan interpretation analisis berpedoman pada kerangka teoritis yang telah dibuat oleh penulis.
2. Bahan-bahan yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, yaitu interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung.

PEMBAHASAN

Dalam peraturan kepailitan (FV) pun menganut konsep utang dalam arti luas. Dalam yurisprudensi ternyata bahwa membayar tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang. Menurut putusan H. R 3 Juni 1921, membayar berarti memenuhi suatu perikatan, ini dapat diperuntukkan untuk menyerahkan barang-barang.¹⁴

Disamping prinsip utang menganut konsep utang dalam arti luas utang yang dijadikan dasar mengajukan kepailitan harus memenuhi unsur:

1. Utang tersebut telah jatuh tempo
2. Utang tersebut dapat ditagih
3. Utang tersebut tidak dibayar lunas.

Suatu utang dapat ditagih jika utang tersebut bukan utang yang timbul dari perikatan alami (*natuurlijke verbintenis*). Perikatan yang pemenuhannya tidak dapat dituntut di muka pengadilan dan yang lazimnya disebut perikatan alami tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pailit. Perikatan alami adalah semisal perikatan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan tidak dapat dituntut pemenuhannya karena perjudian atau pertaruhan (pasal 1788 KUH Perdata), maupun sesudahnya sebagai akibat telah terjadinya kadaluwarsa (pasal 1967 KUH Perdata).¹⁵

Dalam proses acara kepailitan prinsip utang tersebut sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Walaupun telah ada kepastian mengenai penafsiran utang tersebut dalam revisi Undang-undangkepailitan yakni Undang-undang Nomor 37 Tahun

¹⁴ Siti Soemantri Hartono (1993), *Pengantar Hukum Kepailitan dan penundaan Pembayaran*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Hlm 8

¹⁵ Fred BG tumbuan (2004), “ *mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang berkaitan dengan Kepailitan*”, Dalam : Emmy Yuhassrie (ed), *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat pengkajian Hukum, Jakarta, hlm 20-21

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan pembayaran Utang, dimana utang didefinisikan dalam arti luas yang berarti telah paralel dengan konsep KUH Perdata, akan tetapi perubahan konsep utang ini menjadi terdistorsi ketika dikaitkan dengan hakikat kepailitan dalam Undang-undang kepailitan yang hanya bertujuan untuk mempermudah memailitkan subjek hukum dimana syarat kepailitan hanya memiliki dua *variable*, yakni adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kembali serta memiliki setidaknya dua kreditor. Sehingga kemudahan memailitkan subjek hukum seakan dipermudah lagi dengan konsep utang dalam arti luas tersebut. Kelemahan Undang-undang ini sering disalahgunakan, dimana kepailitan bukan sebagai instrumen hukum untuk melakukan distribusi aset debitor akan tetapi digunakan sebagai alat untuk menagih utang atau bahkan untuk mengancam subjek hukum walaupun tidak berkaitan dengan utang.

Hukum kepailitan di Indonesia menganut prinsip utang dalam arti luas, akan tetapi tidak menganut prinsip pembatasan jumlah nilai nominal uang seperti yang terdapat dalam sistem kepailitan di Negara lain, misalnya di Singapura dan Hongkong. Hal ini sebagai kekurangan dan bahkan kelemahan aturan hukum kepailitan di Indonesia. Argumentasi yuridisnya adalah bahwa dengan tidak dibatasi jumlah minimum utang sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan, maka akan terjadi penyimpangan hakikat kepailitan dari kepailitan sebagai pranata likuidasi yang cepat terhadap kondisi keuangan debitor yang tidak mampu melakukan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditornya sehingga untuk mencegah terjadinya *unlawful execution* dari para kreditornya, menjadi kepailitan sebagai alat tagih semata (*debt collection tool*). Di samping itu pula, dengan tidak adanya pembatasan jumlah minimum utang tersebut, bisa merugikan kreditor yang memiliki utang yang jauh lebih besar terhadap debitor.

Dari kasus yang pernah terjadi, misalnya PT Dirgantara Indonesia dan Adam Air, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan tersebut diajukan oleh golongan kreditor preferens. Golongan kreditor preferens, menurut Pasal 1149 KUHPerdata juga meliputi para buruh/ karyawan perusahaan. Artinya bila gaji karyawan yang menjadi haknya itu tidak segera dibayarkan dan mereka tidak

bersabar maka, perusahaan berpotensi besar dapat dinyatakan pailit. Untuk memenuhi syarat pailit begitu mudahnya karena tidak meliputi keadaan keuangan debitor. Putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan putusan pernyataan pailit, biasanya berkuat pada syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 2 saja. Walaupun Hakim beranggapan bahwa debitor dalam keadaan keuangan yang sehat sehingga tidak layak untuk dipailitkan, namun itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit. Sekali lagi, dasar diterima atau ditolaknya permohonan pailit harus didasarkan pada syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

Di Indonesia tidak dikenal adanya "insolvency test" terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pailit. Harusnya Undang-Undang Kepailitan juga memberikan pengaturan tentang kondisi keuangan debitor sebagai syarat untuk bisa dinyatakan pailit. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengandung asas kelangsungan usaha, dimana debitor yang masih prospektif dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya. Untuk melihat prospektif debitor salah satunya dapat dilihat dari keadaan keuangannya. Namun, Undang-undang Kepailitan sama sekali tidak menyinggung tentang kondisi keuangan debitor sebagai syarat dijatuhkannya putusan pailit. Lembaga kepailitan harusnya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam menyelesaikan utang-utang yang sudah tidak mampu lagi dibayar oleh debitor.

Konsep utang sebagai dasar untuk mengajukan permohonan kepailitan telah ditegaskan kembali dalam undang-undang kepailitan 2004 yakni Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 1 angka 6 secara tegas menyatakan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Namun demikian, konsep utang yang dikonstatir dalam Undang-undang kepailitan yang baru tersebut masih mentah dan belum tuntas, terutama berkaitan

dengan batasan jumlah utang. Adapun argumentasi yuridisnya adalah bahwa tujuan kepailitan khususnya dalam perspektif perseroan terbatas adalah sebagai pranata hukum terakhir bagi penyelesaian utang-utang perseroan terbatas setelah terlebih dahulu diupayakan solusi-solusi lain sebagai akibat dari kesulitan keuangan perusahaan dan bukan sebagai alat untuk menagih utang kepada perseroan terbatas, sehingga utang yang dapat dijatuhkan untuk menjadi dasar permohonan kepailitan haruslah merupakan utang besar yang signifikan bagi perseroan terbatas bukan sembarang utang. Hal ini berarti bahwa seharusnya Undang-undang menentukan bahwa ada batasan utang tertentu untuk dapat dijadikan sebagai dasar permohonan pailit, misalnya utang tersebut minimal separuh dari aset perseroan terbatas atau total utang harus lebih besar dari pada aset perseroan. Bisa dibayangkan ada perseroan terbatas yang dipailitkan hanya karena utang yang kurang dari satu persen dari aset perseroan itu sendiri. Dengan kata lain, kepailitan bisa digunakan untuk membangkrutkan perseroan dan bukan sebaliknya sebagai alternatif solusi penyelesaian kebangkrutan perseroan. Inilah kesalahan terbesar dari filosofi kepailitan yang ditanamkan dalam Undang-undang kepailitan di Indonesia.

Tidak diatur dan dibedakannya antara kemampuan debitor untuk membayar utang dengan kemauan debitor untuk membayar utang mengakibatkan banyak perseroan yang masih solven namun dapat dipailitkan. Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi. Tahap ini penting artinya karena pada tahap inilah nasib debitor pailit ditentukan. Apakah hartanya dibagi-bagi sampai menutupi utang-utangnya ataupun debitor masih dapat bernapas dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi utang. Yang jelas, jika debitor sudah dinyatakan insolvensi, dia sudah benar-benar pailit dan hartanya segera akan dibagi-bagi meskipun hal ini tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa dilanjutkan.

Menurut Dictionary Business of Term, Insolvency diartikan : *insolvency* adalah Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis; atau Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu. Secara umum ada 3 Test Insolvensi untuk mengetahui apakah seseorang/perusahaan mampu atau tidak mampu membayar.

1. *The Ability to Pay Solvency Testn (Cash Flow Solvency Test)*

Tes yang menentukan apakah suatu debitor dapat membayar utangnya ketika utangnya telah jatuh tempo. Melihat masa depan kondisi keuangan debitor dan dilakukan hanya dengan melihat apakah utang seorang debitor telah jatuh tempo dan tidak mampu untuk membayar.

Rumus Perhitungan solvabilitas jangka pendek:

Rumus Perhitungan solvabilitas jangka pendek :

- $N1 \times P1 + N2 \times P2 = \text{FUTURE CASH FLOW}$
- N: Nominal
- P: Probability (Peluang)

- Contoh: Diketahui Perusahaan X memiliki utang yang jatuh tempo disatu tahun buku sebesar Rp.100.000 dan Perusahaan X, tidak memiliki aset (dana). Seandainya Perusahaan X akan memiliki uang sebesar Rp.1.000.000, TAPI kemungkinan mendapatkannya 15% atau kemungkinan mendapatkan Rp.0 dengan kemungkinan 85 %
- Intinya: 85% Perusahaan X tidak akan mampu membayar utangnya (Insolven), ketika jatuh tempo
- 15% Mampu membayar utangnya dan dapat untung Rp.900.000 (Rp.1.000.000-100.000),
- Ditanya: Hitung Future cash Flownya dan Apakah perusahaan masih solven?
- JAWAB
 - $N1 \times P1 + N2 \times P2$
 - $= \text{Rp.1.000.000} \times 15\% + \text{Rp.0} \times 85\%$
 - $= \text{Rp.150.000}$ (Cash Flow Future)
 - Perusahaan masih Solven karena Aset yang akan didapat (150.000) > Kewajiban (100.000).

Solvabilitas Jangka Panjang

Rumus:

Net Cash Provided by operating activities : average total liabilities= cash debt coverage ratio

- >1 maka semakin solven perusahaan itu
- <1 maka semakin insolven perusahaan
- (Intermediate Accounting)

Contoh Kasus:

- Diketahui Perusahaan X (Debitor) dalam menjalankan usahanya selama 5 tahun buku akan memiliki proyek 2 proyek dengan total nilai Rp.8.000.000, dan di penghujung tahun ke lima perusahaan memiliki utang sebesar Rp.6.000.000.
- **Ditanya :** Solvabilitas?
- **Jawab:** $\text{Rp.8.000.000} : \text{Rp.6.000.000} = 1,33$
- Tingkat solven bagus karena rasio 1,3 adalah angka yang positif.

2. The Balance Sheet test

Apabila utang (Responsibility) telah melebihi asetnya, kondisi keuangan lebih besar daripada asetnya berdasarkan penilaian yang wajar.

Rumus: $\text{Aliran uang yang akan masuk} : 1 + \text{persentase kenaikan nilai uang (inflasi)} = \text{nilai uang saat ini}$

Contoh Kasus: diketahui Perusahaan JAYA menjalankan usaha dan memiliki utang Rp.100.000 yang harus dibayar dalam 1 akhir tahun, perusahaan tidak memiliki uang tunai kecuali proyek yang akan menghasilkan nilai uang Rp.108.000, lalu diketahui bahwa kenaikan inflasi dalam rangka untuk membayar utang sebesar 10%

Ditanya: Apakah Perusahaan JAYA solven dimasa akan datang.

Jawab: $\text{Rp.108.000} / 1 + 10\% = \text{Rp.98.180}$

Perusahaan Tidak Solven dan dapat dipailitkan.

3. The Capital Adequacy test/analisis transaksional,

Tes ini jarang dilakukan Introduction to Analysis Economic Of Law. Pendekatan analisa ekonomi atas hukum dalam Kasus Kepailitan dan Reorganisasi Perusahaan (PKPU) Penundaan kewajiban pembayaran utang dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian dengan tujuan debitur tidak dipailitkan Reorganisasi Perusahaan: Mem-Fresh Start Perusahaan dengan cara memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk dapat mengelola perusahaannya dari awal dengan cara mem-format komponen perusahaan yang ada didalamnya menjadi baru. Tujuannya: Perusahaan dapat bangkit kembali.¹⁶

Dari penjelasan tiga rumus umum *Insolvency test* diatas dapat di simpulkan bahwa Undang-undang kepailitan harus segera mengadopsi tentang syarat insolvensi atau keadaan keuangan debitur yang lebih rendah daripada utangnya untuk menjatuhkan pailit sebuah perseroan, karena Bisa dibayangkan ada perseroan terbatas yang dipailitkan hanya karena utang yang kurang dari satu persen dari aset perseroan itu sendiri. Dengan kata lain, kepailitan bisa digunakan untuk membangkrutkan perseroan dan bukan sebaliknya sebagai alternatif solusi penyelesaian kebangkrutan perseroan. Inilah kesalahan terbesar dari filosofi kepailitan yang ditanamkan dalam Undang-undang kepailitan di Indonesia.

¹⁶ Prinsip Umum Kepailitan, Instrumen Insolvensi dan Aspek Ekonomi PKPU Dipersentasikan oleh Josye Andreas Neumann Barus Pada Internal Study Business Law Society (BLS) Fakultas Hukum UI 2011 <http://blsfhui.tumblr.com/> (di unduh pada tanggal 4 februari 2012 pukul 10.24 wib)

PENUTUP

KESIMPULAN

Hukum kepailitan di Indonesia menganut prinsip utang dalam arti luas, akan tetapi tidak menganut prinsip pembatasan jumlah nilai nominal uang seperti yang terdapat dalam sistem kepailitan di Negara lain, misalnya di Singapura dan Hongkong. Hal ini sebagai kekurangan dan bahkan kelemahan aturan hukum kepailitan di Indonesia.

Argumentasi yuridisnya adalah bahwa dengan tidak dibatasi jumlah minimum utang sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan, maka akan terjadi penyimpangan hakikat kepailitan dari kepailitan sebagai pranata likuidasi yang cepat terhadap kondisi keuangan debitor yang tidak mampu melakukan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditornya sehingga untuk mencegah terjadinya *unlawful execution* dari para kreditornya, menjadi kepailitan sebagai alat tagih semata (*debt collection tool*). Di samping itu pula, dengan tidak adanya pembatasan jumlah minimum utang tersebut, bisa merugikan kreditor yang memiliki utang yang jauh lebih besar terhadap debitor ataupun merugikan debitor yang memiliki kekayaan yang lebih besar daripada utang.

Dalam hukum kepailitan di Indonesia tidak dikenal adanya *insolvency test* terhadap permohonan kepailitan debitor sehingga besarnya asset tidak dipertimbangkan untuk menolak ataupun menerima permohonan kepailitan, karena itu tidak terdapat perlindungan hukum terhadap perusahaan yang masih sangat solven dari jeratan kepailitan tersebut. Hukum kepailitan di Indonesia lebih ditekankan sebagai debt collection tool atau alat untuk penagihan utang dan alat untuk membangkrutkan perseroan terbatas

SARAN

1. Berkaitan dengan prinsip utang maka perlunya Undang-undang kepailitan menentukan pembatasan jumlah minimal utang yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit baik kepailitan terhadap orang perorangan maupun terhadap perseroan terbatas, serta ketentuan yang

menyatakan bahwa subjek hukum khususnya perseroan terbatas dapat dipailitkan apabila jumlah total seluruh utang melebihi asset perseroan terbatas yang berarti bahwa pasiva perseroan melebihi aktiva perseroan terbatas.

2. Perlunya Undang-undang kepailitan mengatur mengenai bubarnya perseroan terbatas adalah antara lain karena tidak cukupnya harta perseroan untuk melunasi utang-utang perseroan terbatas yang pailit serta karena perseroan terbatas memasuki fase insolvensi dalam proses kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali, Achmad, 1996. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. ctk pertama, Chandra Pratama, Jakarta.
- Amirudin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Asyhidie, Zaeni, 2005. hukum bisnis “ *prinsip dan pembinaannya di Indonesia*”. PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Budiarto, Agus, 2009. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. edisi 2, Jakarta.
- Friedman, W., 1993. teori dan filsafat hukum dalam buku telaah kritis atas teori-teori hukum diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theori oleh Arifin. raja grafindo persada, Jakarta.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti Bandung.
- , 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hartono, Siti Soemantri, 1993. *Pengantar Hukum Kepailitan dan penundaan Pembayaran*. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta
- Hartono, Sri Rejeki, 2000, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepaitan Modern*. Majalah Hukum Nasional, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2006 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Surabaya.
- Juwana, Hikmanto, 2004. *Hukum Sebagai Instrumen Politik*, Medan.
- Jono, 2010, *hukum kepailitan*. ctk kedua, sinar grafika, Jakarta.
- Kartono, *kepailitan dan penundaan pembayaran, pradnya paramita*, Jakarta.
- Kosidin, Koko, 1994. *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*. Mandar Maju, Bandung.
- Lontoh, Rudy (ED), 2001 *Penyelesaian utang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang*. Bandung

- Muljadi, Kartini, 2001, *action paulina dan pokok-pokok tentang pengadilan niaga*, dalam: Rudhy A.Lontoh et.al, *Penyelesaian utang Piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran Utang*, Alumni Bandung.
- Rahadjo, Satjipto, 2002. *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Hukum*, (Surakarta :Universitas Muhamadiyah)
- Rinanti, Triweka, 2006. *Dilema Kreditur Separatis di Pengadilan Niaga*. Ctk. Kedua, Jakarta.
- Sastrawidjaja, Man. S. , 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni, Bandung.
- Shuban, Hadi, 2009. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma,dan Praktik di Peradilan*. Kencana, Jakarta.
- Situmorang, Victor M dkk, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. PT Rineka Cipta,Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2009, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Ctk. Ketiga, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Syamsudin, M., 2007, *operasional penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tumbuan, Fred BG, 2004. *mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang berkaitan dengan Kepailitan*, Dalam : Emmy Yuhassrie (ed), *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat pengkajian Hukum. Jakarta
- Widjaja, Kartini M., G., 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT.RajaGrafindo Persada.
- Yani, Ahmad dkk, 2002. *kepailitan seri hukum bisnis*, Raja Grafindo persada, Jakarta.

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI)1945;

Undang-undang nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 Tentang perseroan terbatas

Situs internet

Antara news.com Hayono: **putusan pailit yang menimpa Telkomsel mengerikan** <http://www.antaraneews.com/berita/338197/hayono-putusan-pailit-yang-menimpa-telkomsel-mengerikan> di unduh pada tanggal 28/11/2012 pukul 17:29 Wib

Zulkarnain Sitompul, **dalam artikelnya berjudul Perlukah PT DI dipailitkan.**
http: // zulsitompul. wordpress. Com (diakses hari minggu tanggal 20 januari pukul 15.34 wib)

Prinsip Umum Kepailitan, Instrumen Insolvensi dan Aspek Ekonomi PKPU

Dipersentasikan oleh Josye Andreas Neumann Barus Pada Internal Study Business Law Society (BLS) Fakultas Hukum UI 2011
<http://blsfhui.tumblr.com/> (di unduh pada tanggal 4 februari 2012 pukul 10.24 wib)